

## **ANALISIS PENDOKUMENTASIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2012 DI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDUNG**

**Novi Yuliani, Ekawati, Bina Kurniawan**

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan  
Masyarakat  
Universitas Diponegoro  
Email: [yulianinovi9@gmail.com](mailto:yulianinovi9@gmail.com)

**Abstract:** *Occupational Health And Safety Management System or called OHSMS is a part of company management system in order to risk control that associated with work process to make a safe and healthy workplace. In PP No. 50 Tahun 2012 requires to documenting all important element in OHSMS and everything that associated with those element. PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung have applying OHSMS for 1 year since March 2014 and already certified but in implementation at the workplace especially in documentation of OHSMS, there are still many documents related to the implementation OHSMS have not been made by worker, because the safety unit has not establish in this company. The purpose of this research was to analyse compatibility of documenting OHSMS with the regulation. This research is a descriptive qualitative research with indepth interview. The subjects of this research were 4 people as key informants from worker of every unit, Teknik Umum, TLMP, PKP-PK and Elektronika and 1 people as a triangulation informant is OHS coordinator. The result show there is still mismatch of OHSMS reporting based on the government regulation. Controlling document done with structuring and maintenance the documents. Recording and information management held for workers with socialization and for guest or others through OHS Coordinator. This needs socialization and training about OHSMS. Procedure of reporting system, forming an OHS unit and procurement information boards about OHS.*

**Key Words** : documenting, OHSMS, PP No. 50 Tahun 2012

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan suatu negara baik sekarang maupun dimasa yang akan datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja. Untuk dapat membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik terutama yang terkait dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penerapan pengaturan perundang-undangan dan pengawasan serta perlindungan para tenaga kerja merupakan prinsip dasar dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). K3 yang disesuaikan dengan sistem ergonomi (penyesuaian beban kerja/alat kerja dengan kemampuan dan fisik pekerja) merupakan salah satu usaha untuk mencetak para buruh yang produktif dengan peningkatan SDM yang profesional dan handal.<sup>(1)</sup>

Didalam pasal 87 (1) UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa; setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ketentuan

mengenai penerapan SMK3 diatur dalam PP no. 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).<sup>(2)</sup>

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>(3)</sup>

Walaupun penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah diwajibkan, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan, karena jumlah organisasi yang menerapkan dengan baik masih sangat kurang.<sup>(4)</sup> Dalam penerapannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan pendokumentasian terkait dengan seluruh kegiatan yang berhubungan

dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan di suatu perusahaan.

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan di dokumentasikan serta diperbarui apabila diperlukan. Perusahaan harus jelas menentukan jenis dokumen dan pengendaliannya yang efektif.<sup>(5)</sup>

Sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 mensyaratkan untuk mendokumentasikan semua elemen-elemen penting dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan yang berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Banyak aspek K3 yang perlu didokumentasikan seperti proses dan prosedur yang dijalankan dalam pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam pelaksanaan elemen strategi pendokumentasian terdapat beberapa bagian yaitu pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3), Pendokumentasian SMK3, Pengendalian dokumen serta Manajemen dan pencatatan informasi.

Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) seperti kebijakan, prosedur, instruksi kerja perlu dikomunikasikan untuk menjamin bahwa seluruh unsur terkait menerima informasi yang sama tentang apa yang diperlukan untuk manajemen K3. Tindakan seperti penilaian resiko, rencana pengendalian, pertemuan, inspeksi, investigasi kecelakaan dan insiden, pemantauan kesehatan, pemeliharaan perusahaan, tinjauan ulang dan evaluasi kegiatan perlu dicatat dan didokumentasikan karena hal tersebut merupakan sumber informasi penting untuk efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan memberikan bukti bahwa pengurus telah melaksanakan K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendokumentasian tersebut digunakan untuk monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SMK3 di perusahaan.<sup>(1)</sup>

Dalam PP no 50 tahun 2012 tidak secara rinci menyebutkan dokumentasi seperti apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan diberikan kebebasan menentukan jenis dokumentasi yang ingin dibuat. Agar dapat menentukan dokumentasi apa saja yang harus dibuat maka perusahaan merujuk

pada hirarki atau tingkatan dokumen. Dimana dokumen level pertama yaitu Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokumen level kedua yaitu prosedur-prosedur, dokumen level ketiga yaitu instruksi kerja dan dokumen level keempat yaitu *record* atau form daftar periksa kegiatan K3.

PT Angkasa Pura II (PERSERO) kantor cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia. Sebagai perusahaan pengelola bandara, PT Angkasa Pura II (PERSERO) kantor cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung memiliki kecanggihan teknologi dalam pelayanan lalu lintas udara tersebut. Berbagai jenis pekerjaan ini juga dapat menimbulkan berbagai hazard dan risiko terjadinya kecelakaan kerja yang akan timbul di tempat kerja.

Hasil Survei awal didapat bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) selama kurang lebih 1 Tahun terhitung sejak Maret 2014 dan telah mendapatkan sertifikasi SMK3. Saat Survei awal dilakukan wawancara dengan Ahli K3 PT

Angkasa Pura II (Persero) Bandung dan diketahui bahwa dalam penerapan terutama dalam pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) masih belum maksimal, walaupun telah memiliki Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) namun masih banyak dokumen yang belum dibuat seperti, laporan inspeksi setiap minggunya, notulensi rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pelaporan dari setiap program K3 yang ada dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM terutama dalam bidang K3, sehingga belum terbentuknya departemen K3 di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dokumentasi merupakan bentuk dasar untuk memahami sistem, mengkomunikasikan proses dan persyaratan pada organisasi, serta menentukan keefektifan penerapannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada PT Angkasa Pura II (Persero) untuk melihat bagaimana strategi pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP no. 50 Tahun 2012.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Informan utama dalam penelitian ini adalah pekerja pelaksana di bagian elektronika, teknik umum, Teknik listrik mekanika dan peralatan (TLMP) dan Perolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan informan triangulasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator K3 atau Ahli K3 PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi terhadap fasilitas pendukung dalam hal pendokumentasian SMK3 maupun dokumen-dokumen perusahaan terkait SMK3 yang selanjutnya dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan utama. Pengumpulan fakta dari fenomena atau peristiwa – peristiwa yang bersifat khusus kemudian masuk pada kesimpulan yang bersifat umum.

Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dengan sumber membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan pada suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Reliabilitas penelitian dapat dicapai dengan auditing data. Melakukan proses pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk mengetahui dan membandingkan rekaman, catatan wawancara dan kesimpulan yang dihasilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Penelitian ini mengambil 4 orang pekerja pelaksana di setiap unit yang ada di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di unit. Pendidikan terakhir informan utama penelitian ini yaitu 3 informan berpendidikan terakhir yaitu S1 dan 1 informan berpendidikan terakhir D3. Untuk persyaratan pendidikan terakhir setiap pekerja di PT Angkasa Pura II (persero) Bandung sudah sesuai. Sedangkan untuk segi umur ideal untuk pekerja di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung yaitu umur 21-50 tahun. Untuk informan utama sudah sesuai dengan klasifikasi umur pekerja di perusahaan tersebut.

Semua informan utama telah mengetahui apa yang dimaksud dengan SMK3 dan bagaimana fungsi dari

pelaksanaannya, namun belum mengetahui peraturan terkait SMK3 yang menjadi dasar dari penerapan SMK3 di bandara. Untuk pengetahuan tentang pendokumentasian SMK3 di setiap unit 3 informan utama dapat menyebutkan apa saja dokumen yang berkaitan terhadap pelaksanaan SMK3, dan terdapat 1 informan yang mengatakan tidak mengetahui pendokumentasian SMK3 di unitnya. 1 informan utama penelitian ini pernah mengikuti pelatihan Ahli K3 umum namun belum pernah mengikuti secara spesifik pelatihan tentang SMK3.

Sedangkan untuk informan triangulasi diambil dari koordinator K3 PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung. Informan triangulasi ini memiliki pendidikan terakhir yaitu S1 dengan usia 29 tahun dan telah bekerja selama 6 tahun. Pemilihan informan triangulasi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan kewenangan di perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan K3 di bandara.

### **Analisis Pelaporan SMK3**

Pelaporan SMK3 di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung berupa pelaporan program K3 di setiap unit yaitu dalam hal pengadaan APD, pelaporan kecelakaan, dan ketidaksesuaian proses kerja terhadap peraturan perundangan. Pelaporan tersebut

dilakukan oleh setiap unit hanya pada saat koordinator K3 melakukan inspeksi ke setiap unit secara lisan oleh pekerja di setiap unit dan Koordinator juga melihat catatan *shift logbook* karena semua pekerjaan setiap shift sifatnya wajib dicatat dalam buku tersebut. Selain itu kekurangan dalam sistem pelaporan SMK3 dikarenakan belum terdapat prosedur yang berkaitan dengan sistem pelaporan dari setiap unit ke Koordinator K3 bandara sehingga pekerja belum memahami mekanisme pelaporan tersebut. Selain itu belum terbentuknya unit K3 juga menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan dan penerapan SMK3.

Didalam PP No. 50 tahun 2012 dalam pelaporan K3 terdapat beberapa item atau kegiatan yang harus dilaporkan ke unit K3 yaitu laporan kecelakaan di tempat kerja; ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar; kinerja K3; identifikasi sumber bahaya; dan hal lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>(3)</sup>

### **Analisis Pendokumentasian SMK3**

Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk menyatukan secara sistematis antara kebijakan, tujuan dan sasaran K3, menguraikan sarana

pencapaian tujuan dan sasaran K3, mendokumentasikan peranan, tanggung jawab, dan prosedur, memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan dan menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.<sup>(6)</sup>

Pembuatan dokumen-dokumen penting terkait penerapan SMK3 seperti lembar inspeksi K3, *form* identifikasi bahaya (Risk analysis), *Form* laporan kerja aman, *Form Working Permit* dan arsip dokumen lainnya bertujuan untuk membuktikan segala penerapan SMK3 di perusahaan sekaligus sebagai indikator kerja.<sup>(7)</sup>

Pendokumentasian SMK3 di PT Angkasa Pura II (Persero) masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan standar penerapan SMK3 dalam PP No. 50 tahun 2012 berupa dokumen mengenai *risk assessment*, *record* pelaksanaan K3 di setiap unit yang belum tersedia. Hal ini dikarenakan belum terintegrasinya antara sistem manajemen bandara dengan sistem manajemen K3 sehingga pekeja masih bingung untuk mendokumentasikan setiap hal yang berkaitan dengan K3. namun dalam pendokumentasian sistem setiap prosedur kerja dan izin telah terdokumentasi dengan baik karena di

setiap unit telah dibuat prosedur yang sesuai dengan aspek K3.

### Analisis Pengendalian Dokumen

Persyaratan dalam pendokumentasian K3 yaitu setiap dokumen harus dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab perusahaan, dokumen ditinjau ulang berkala dan jika diperlukan dilakukan revisi, dokumen sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang, dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu, semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan dan dokumen harus mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.<sup>(5)</sup>

Dalam aspek pengendalian dokumen di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung dilihat dari beberapa hal yaitu sudah adanya prosedur yang jelas terkait dengan pembuatan dan pengesahan dokumen terkait K3, peninjauan ulang berkala dokumen setiap 1 sampai 2 tahun sekali oleh setiap unit dan pembaruan dari setiap dokumen yang telah usang namun masih terdapat ketidaksesuaian pada peninjauan berkala dokumen yang harusnya dilakukan minimal 6 sampai dengan 1 tahun sekali menurut standard dan belum dilakukan *recording* atau pencatatan dalam lampiran

dokumen yang telah ditinjau ulang sebagai bukti bahwa telah dilakukan peninjauan berkala. Selain itu pada dokumen yang telah usang seharusnya dilakukan pesmunan agar dokumen tersebut tidak digunakan kembali oleh pekerja, sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.

### **Analisis Pencatatan dan Manajemen Informasi**

Pencatatan dan manajemen informasi dilakukan dengan Mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;<sup>(3)</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harlina, Syamsiar dan Masyitha menjelaskan bahwa pencatatan dan manajemen informasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sosialisasi SMK3 pada pekerja sehingga pekerja maupun orang diluar pekerja dapat mengetahui adanya penerapan K3 di lingkungan perusahaan.<sup>(8)</sup>

Pencatatan dan manajemen informasi di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung yang dilakukan dengan pencatatan

informasi mengenai K3 oleh setiap unit yang ada pada logbook yang telah disediakan yang kemudian akan dikomunikasikan oleh koordinator K3 saat dilakukan inspeksi atau pengecekan berkala ke setiap unit yang selanjutnya dicatan dan diberikan rekomendasi yang sesuai dengan keadaan lapangan. Selain itu terdapat penyediaan informasi K3 bagi pekerja maupun orang diluar pekerja. Untuk pekerja dilakukan melalui rapat manajemen ataupun saat rapat P2K3, sosialisasi saat inspeksi oleh koordinator K3 baik secara lisan maupun tulisan ataupun penempelan poster terkait K3 dan untuk diluar pekerja informasi tersebut didapat dengan menghubungi koordinator K3. Namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan dalam aspek pencatatan dan manajemen informasi seperti masih ditemukan belum ditempelnya instruksi kerja di area kerja, penyediaan papan informasi mengenai kinerja K3 perusahaan dan juga *safety briefing* bagi pekerja maupun orang diluar pekerja pada saat memasuki area bandara

### **KESIMPULAN**

1. Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung



sudah dilaksanakan namun belum secara maksimal karena belum adanya sistem pelaporan secara tertulis ke koordinator K3.

2. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung pada aspek pembuatan rekaman pelaksanaan program K3 belum dilakukan secara maksimal walaupun sudah ada manual, prosedur dan instruksi kerja. Hal ini juga dipengaruhi karena perusahaan tidak mengacu pada peraturan tentang K3 tetapi peraturan keselamatan penerbangan baik internasional maupun nasional.
3. Pengendalian dokumen di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung dilakukan dengan pemeliharaan dan penataan dokumen terkait SMK3 serta adanya prosedur tentang alur pembuatan dan persetujuan dokumen serta untuk penanganan dokumen yang usang
4. Pencatatan dan manajemen informasi mengenai Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung untuk pekerja dilakukan dengan cara sosialisasi koordinator K3 ke setiap unit yang ada di bandara, pada saat rapat

manajemen selain itu koordinator K3 juga memberikan selebaran terkait informasi K3. Penyediaan informasi untuk orang yang berasal dari perusahaan langsung melalui koordinator K3.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Tarwaka. *Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press. 2008
2. Direktorat Pengawas Norma K3. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta. 2007
3. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *PP No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta. 2012
4. Ramli, Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. 2010
5. Suardi, Rudi. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM. 2008
6. Imaculata Firani Mentang, Marisca. *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Peningkatan*

*Fasilitas PT. Trakindo Utama  
Balikpapan. Dalam Jurnal Sipil Statik  
Vol.1 No.5, April 2013 (318-327) ISSN:  
2337-6732*

7. FKM UNDIP. *Jurnal Kesehatan Masyarakat 2013, Volume 2, Nomor 1, Januari 2013. Online di <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm>*
8. Selyanti, Harlina, Syamsiar S. Russeng dan Masyitha Muis. *Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Pt. Semen Bosowa Maros. Bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja, FKM UNHAS, Makassar. 2013*